

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hal yang sangat diinginkan bagi setiap orang yang ada di dunia ini, pengertian sehat menurut UU Pokok Kesehatan No. 9 Tahun 1960, Bab I Pasal 2 adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental) dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Pada saat sekarang ini di Indonesia, pemberian layanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh bagaimana status sosial sekarang. Masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berbeda dengan mereka yang memiliki ekonomi rendah atau bisa disebut miskin. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari kapitalisasi yang telah masuk di dalam dunia kesehatan. Bukan menjadi masalah bagi mereka yang berada pada status sosial menengah ke atas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, namun hal ini justru menjadi persoalan tersendiri bagi mereka yang menduduki status sosial rendah atau miskin, mengingat bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat mungkin bagi setiap orang di negara ini, karena jika dibiarkan dampaknya akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang akan datang. Berhubungan dengan permasalahan ini, untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan maka pemerintah memberikan bantuan berupa jaminan kesehatan khusus bagi masyarakat miskin yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (BPJS Kesehatan PBI). BPJS Kesehatan kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Berdasarkan PP No. 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan Iuran jaminan kesehatan, pasal 1 ayat (4) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan, dan berdasarkan PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, pasal 1 ayat (3) Iuran program Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah. Tujuan dari BPJS Kesehatan adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat kurang mampu dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan Masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien (Mahendra et al., 2023).

Praktek lapangan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kriteria penerima bantuan langsung tunai yang sudah terjadi biasanya tidak mengacu pada kriteria-kriteria keluarga miskin, diperlukan sebuah sistem informasi yang baik untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dapat mengatasi masalah ini, sistem ini berguna untuk memudahkan pengambilan keputusan yang terkait dengan masalah seleksi penerima bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin, sehingga akan didapatkan keluarga yang paling layak diberi bantuan langsung tunai. Pembuatan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini bertujuan sebagai alat bantu bagi instalasi yang terkait, untuk menentukan penerima bantuan langsung tunai secara tepat sasaran dalam penyaluran bantuan langsung tunai tersebut (Tejasukmana Putra et al., 2021).

Metode *Multi Objective Optimization on The Basis of Ratio Analysis* (MOORA) adalah metode yang dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan

keputusan untuk menetapkan usaha pemilihan keputusan. MOORA memiliki keunggulan dalam pengolahan analisis multi-kriteria secara efisien karena dapat mengintegrasikan berbagai faktor dengan sistematis. Ada beberapa model yang dapat digunakan untuk membangun sebuah sistem pendukung keputusan, salah satunya adalah metode *Multi Objective Optimization on The Basis of Ratio Analysis* (MOORA). MOORA merupakan salah satu yang dapat melakukan perhitungan terhadap nilai kriteria atribut yang membantu pengambil keputusan untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Sistem penunjang keputusan dengan metode MOORA ini dibuat untuk dapat membantu dalam pemilihan (Sembiring et al., 2021). Dibandingkan metode lain seperti *Analytical Hierarchy Process* (AHP) atau *Simple Additive Weighting* (SAW), MOORA menawarkan proses analisis yang lebih sederhana namun tetap memberikan hasil yang dapat diandalkan (Nurhaliza et al., 2022). Penulis memilih metode ini karena MOORA mampu mengoptimalkan beberapa atribut yang saling berlawanan secara simultan. Selain itu, metode ini juga cocok digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis permasalahan dengan perhitungan matematika yang kompleks (Muh. Miftakhun Nizar et al., 2021). Karena keunggulannya MOORA banyak digunakan dalam penelitian yang bertujuan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada hasil akhir yang dihasilkan oleh satu metode, tetapi juga melibatkan proses evaluasi tambahan guna memperkuat keakuratan keputusan. Salah satu metode evaluasi yang digunakan adalah korelasi Spearman, yaitu sebuah digunakan untuk mencari hubungan antara variabel jika data pengamatan berupa skala ordinal, dalam hal ini untuk uji korelasi statistika non parametrik. Dengan kata lain Korelasi rank spearman

digunakan untuk menilai adanya seberapa baik fungsi monotonik (suatu fungsi yang sesuai perintah) arbiter digunakan untuk menggambarkan hubungan dua variabel dengan tanpa membuat asumsi distribusi frekuensi dari variabel-variabel yang diteliti (Yasril & Fatma, 2021).

Prosedur penentuan penerima bantuan kesehatan melalui BPJS Kesehatan secara umum mencakup beberapa tahapan penting seperti melakukan pendataan awal, *verifikasi* dan validasi data, penilaian kelayakan peserta, pengusulan dan penetapan peserta oleh pemerintah, integrasi data ke dalam sistem BPJS Kesehatan dan *monitoring* serta evaluasi yang dilakukan secara berkala (Novitri Ramadhani Hasibuan et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu aplikasi yang dapat melakukan proses seleksi calon penerima bantuan BPJS Kesehatan sehingga lebih mudah dan menjadi alternatif pilihan bagi Pemerintah daerah dalam menentukan penduduk yang berhak mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan di daerah khususnya Kota Padang Panjang. Aplikasi sistem pendukung keputusan ini dibuat berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman *Hypertext Preprocessor* (PHP) dengan metode *Multi Objective Optimization on The Basis of Ratio Analysis* (MOORA), dan juga menggunakan MySQL sebagai databasenya. Dalam penelitian ini nantinya penulis akan melakukan pendataan setiap kepala keluarga yang terdapat di sekitar Kota Padang Panjang. Dengan adanya sistem tersebut, perintah akan dilakukan secara objektif, tepat dan terperinci. Untuk menentukan penduduk mana saja yang benar-benar berhak menerima bantuan, maka dilakukan dengan menghimpun data warga dengan mempertimbangkan nilai rumus metode MOORA pada setiap kriteria yang ditentukan (Rasmita Ngemba et al., 2021).

Pegembangan teknologi yang dilakukan pada BPJS Kesehatan di tingkat daerah seperti Kota Padang Panjang bersama dengan Kelurahan Sigando beserta instansi lainnya yang terkait dipastikan dapat meningkatkan efektivitas program bantuan, memastikan bahwa bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar berhak, dan pada saat yang sama mengurangi potensi penyalahgunaan atau kesalahan administratif. Kedepannya, optimalisasi teknologi informasi diharapkan menjadi dasar utama dalam reformasi sistem perlindungan sosial yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Hasil akhir yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini nantinya adalah berupa solusi untuk menentukan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan pada Kelurahan Sigando, Kota Padang Panjang, sehingga proses seleksi dapat lebih efektif, tepat sasaran dan juga signifikan dari segi waktu dan operasional. Penelitian ini juga akan mendapat hasil akhir berdasarkan perhitungan manual sebagai pembandingan dengan perhitungan sistem yang akan dibangun sehingga akan diperoleh hasil yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dapat memproses seleksi calon penerima bantuan kesehatan. Hasil dari proses sistem dengan menggunakan metode MOORA adalah untuk menentukan prioritas utama penerima bantuan kesehatan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengangkat judul penelitian yaitu **“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN DALAM MENENTUKAN MASYARAKAT YANG BERHAK MENERIMA BANTUAN KESEHATAN DI BPJS KESEHATAN PADANG PANJANG MENGGUNAKAN METODE MOORA”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan dibahas pada laporan ini sebagai berikut:

1. Apa saja kriteria yang relevan dan perlu dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan BPJS Kesehatan?
2. Bagaimana sistem pendukung keputusan dapat diimplementasikan dalam penentuan masyarakat yang berhak menerima bantuan BPJS Kesehatan?
3. Bagaimana metode Moora dapat diterapkan untuk mengevaluasi dan menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan BPJS Kesehatan berdasarkan berbagai kriteria yang ada?

1.3 Hipotesa

Hipotesa merupakan dugaan sementara dimana nantinya akan dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang ada dapat ditemukan beberapa hipotesa sebagai berikut:

1. Penerapan metode Moora pada Sistem Pendukung Keputusan yang diambil dalam pemilihan penerima bantuan BPJS Kesehatan dapat lebih efisien dan transparan, karena metode ini mempertimbangkan berbagai kriteria secara objektif dan berbasis data yang valid.
2. Penerapan metode Moora dalam Sistem Pendukung Keputusan dapat meningkatkan akurasi dan objektivitas dalam penentuan masyarakat yang

berhak menerima bantuan BPJS Kesehatan dibandingkan dengan metode konvensional yang digunakan saat ini.

3. Pemanfaatan metode Moora pada Sistem Pendukung Keputusan yang diambil akan memberikan pengaruh yang signifikan dan efektivitas yang lebih baik dalam proses pengambilan keputusan pemberian bantuan kesehatan juga dapat memberikan kemudahan dan kecepatan proses seleksi penerima bantuan kesehatan.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan membahas sistem pendukung keputusan untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan BPJS Kesehatan, yang terbatas pada masyarakat yang tergolong tidak mampu berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini tidak mencakup seluruh program BPJS Kesehatan atau kebijakan yang lainnya yang berhubungan dengan peserta BPJS Kesehatan.

Penelitian ini dibatasi pada wilayah Kelurahan Sigando saja. Data masyarakat yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh dari Kelurahan Sigando, Kota Padang Panjang dan dari instansi terkait yang berwenang, serta untuk menjaga fokus dan analisis yang mendalam.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengembangkan suatu sistem pendukung keputusan diantaranya adalah :

1. Menganalisis efektivitas metode Moora dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, dan objektivitas dalam pengambilan keputusan terkait penerima bantuan BPJS Kesehatan.
2. Menerapkan metode *Moora (Multiple Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis)* dalam sistem pendukung keputusan untuk mengevaluasi alternatif penerima bantuan BPJS Kesehatan berdasarkan sejumlah kriteria objektif, seperti status ekonomi, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, dan kondisi kesehatan.
3. Menguji efektivitas metode MOORA dalam memberikan hasil rekomendasi yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penetapan penerima bantuan oleh pihak BPJS Kesehatan Padang Panjang.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup kontribusi terhadap pengembangan dalam sistem pendukung keputusan diantaranya adalah:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dan penerapan metode Moora dalam konteks penentuan penerima bantuan sosial, khususnya BPJS Kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penggunaan metode multi-kriteria dalam pengambilan keputusan yang kompleks.
2. Keberadaan sistem yang tepat dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, diharapkan lebih banyak masyarakat yang kurang

mampu dapat memperoleh akses ke layanan kesehatan yang layak, sesuai dengan tujuan BPJS Kesehatan.

3. Sistem ini dapat dijadikan alat bantu dalam pengambilan keputusan sosial yang berkeadilan dan transparan, serta menjadi dasar kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi program bantuan kesehatan.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

BPJS Kesehatan ini terletak di Jl.Prof.M Yamin, Silaing Atas, Kota Padang Panjang. BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Padang Panjang. Sebagai bagian dari program pemerintah untuk mencapai *Universal Health Coverage(UHC)*, BPJS Kesehatan di Kota Padang Panjang berupaya untuk memastikan setiap penduduk terdaftar dan mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Hingga September 2023, BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi mencatatkan angka kepesertaan aktif di Kota Padang Panjang mencapai 89,22% Dari total jumlah penduduk sekitar 61.075 jiwa , sekitar 54.291 jiwa telah terdaftar sebagai peserta aktif. Meskipun angka ini menunjukkan tingkat kepesertaan yang tinggi, masih terdapat beberapa peserta yang menunggak iuran, terutama dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU), yang menjadi tantangan bagi BPJS Kesehatan dalam menjaga kelancaran layanan.

Pada tahun 2024, BPJS Kesehatan juga mencatatkan peningkatan jumlah kepesertaan melalui berbagai inisiatif, salah satunya dengan menggandeng pemerintah daerah untuk menjamin aksesibilitas bagi masyarakat tidak mampu.

Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen untuk tetap mempertahankan status *Universal Health Coverage (UHC)*, yaitu memastikan seluruh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mendapatkan perlindungan dari BPJS Kesehatan.

Salah satu pencapaian terbesar BPJS Kesehatan di Padang Panjang adalah keberhasilan dalam mempertahankan status *Universal Health Coverage (UHC)*.

1.7.1 Visi dan Misi BPJS Kesehatan Kota Padang Panjang

1. Visi

BPJS Kesehatan Kota Padang Panjang menjadi lembaga penyelenggara jaminan kesehatan yang unggul, profesional, dan terpercaya dalam memberikan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang, mendukung tercapainya *Universal Health Coverage (UHC)* yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Misi

1. Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan.
2. Menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.
3. Mendukung implementasi Universal Health Coverage (UHC).
4. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui kerjasama.
5. Meningkatkan kepuasan peserta.

1.7.2 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Kota Padang Panjang

Struktur organisasi pada BPJS Kesehatan ini berguna untuk memperjelas peran dan tanggung jawab setiap individu, mengorganisir pekerjaan, meningkatkan

efisiensi dan memfasilitasi komunikasi. Struktur organisasi juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan, mengurangi konflik, dan meningkatkan produktivitas.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Padang Panjang

1.7.3 Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut adalah uraian nya:

1. Kepala Kantor Cabang

Memipin dan mengawasi seluruh aktivitas kantor cabang, menyusun rencana kerja dan anggaran, serta menjalin koordinasi dengan mitra kerja untuk perluasan kepesertaan dan peningkatan layanan.

2. Kepala Unit Pemasaran

Bertanggung jawab atas strategi pemasaran, pengelolaan data potensi pasar, dan pencapaian kualitas layanan sesuai standar.

3. Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer

Mengelola hubungan kemitraan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan memastikan target kepesrtaan.

4. Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik, dan Kepatuhan

Menangani aspek hukum, komunikasi publik, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

5. Kepala Unit Umum dan Keuangan

Mengelola administrasi umum, keuangan, dan kesekretarian kantor cabang.